

PENDEKATAN BUDAYA DALAM PEMERINTAHAN



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL.	: 3-9-98
SUMBER / HARGA	: r /
KOLEKSI	: KJ
NO. INVENTARIS	: 869 / K198 - P, C2)
KLASIFIKASI	: 306 Eff p:1

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Oleh:
Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.

Disampaikan pada seminar dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke 25 di
Kantor Gubernur KDH Tkt. I Sumatera Barat,
Padang tanggal 28 November 1996

PENDEKATAN BUDAYA DALAM PEMERINTAHAN¹⁾

(Makalah Bahasan)

Oleh: Dr. Z.Mawardi Effendi, M.Pd^{**)}

A. Pendahuluan

Setelah membaca makalah Bapak Asril Saman yang berjudul "Pendekatan Budaya dalam Pemerintahan" pada dasarnya saya banyak yang sependapat dengan apa yang dikemukakan beliau dalam makalah tersebut. Namun demikian memang ada juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan topik diskusi ini, yang kalau saya tidak salah adalah "Peningkatan profesional aparatur yang bersih dan berwibawa dalam rangka menghadapi era globalisasi".

Menurut Bapak Asril Saman, simpati dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dan untuk diterimanya pemerintahan dalam masyarakat, termasuk untuk Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Selain itu beliau juga mensinyalir adanya peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa keadaan seperti ini disebabkan antara lain mungkin oleh semakin tingginya kecerdasan masyarakat dan arus globalisasi, serta situasi politik dan pemerintah yang kurang mengacuhkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di sekitarnya.

Untuk menciptakan simpati dan partisipasi masyarakat serta mengatasi masalah yang dikemukakan di atas lalu Bapak Asril Saman mengusulkan supaya pendekatan budaya lebih banyak digunakan dan ditonjolkan dalam pemerintahan di samping pendekatan-pendekatan lainnya.

Pendekatan budaya menurut beliau mencakup tiga aspek: 1) pendekatan dengan mengedepankan budi dibandingkan dengan menggunakan daya (kekuatan/kekuasaan/ wewenang hukum dengan berbagai sanksinya, iptek dengan segalanya pertimbangan rasionalnya, dan sebagainya; 2) pendekatan budaya

¹⁾ Disampaikan pada seminar dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke 25 di Kantor Gubernur KDH Tk.I Sumbar, Padang, tanggal 28 November 1996.

^{**)} Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Padang

masyarakat, di mana pemerintah mempertimbangkan budaya masyarakat, dalam arti jangan sampai merusak atau bertentangan dengan budaya masyarakat, tetapi sebaliknya memanfaatkan budaya masyarakat; dan 3) Pendekatan budaya Pancasila dalam penyelenggaraan tugas.

Dengan pendekatan budaya ini ini menurut beliau, di samping bisa menimbulkan simpati dan partisipasi masyarakat juga penting dalam menghadapi tantangan era globalisasi, mengantisipasi masuknya budaya lain ke dalam pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

B. Pembahasan

Seperti pada bagian awal sudah dikemukakan bahwa pada dasarnya saya banyak yang sependapat dengan Bapak Asril Saman. Di antaranya:

1. Memang dibutuhkan banyak pendekatan dalam melaksanakan pemerintahan, karena di pundak pemerintah tergantung seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada Pembukaan UUD 1945 secara tegas dicantumkan "... pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Untuk melaksanakan semua ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan keadaan yang dihadapi di dalam masyarakat;
2. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan pemerintahan;
3. Nilai-nilai budaya masyarakat sangat berpengaruh dalam tingkah laku masyarakat, dan hal ini perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan pemerintahan; dan
4. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai dasar bernegara dan berbangsa.

Selain itu ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk bisa melaksanakan semua tanggung jawab pemerintah Indonesia yang secara konseptual dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 itu, pemerintah

negara Indonesia harus kuat dan mampu melaksanakan tanggung jawab besar tersebut. Maju mundurnya negara Indonesia sebagian besar ditentukan oleh pemerintahnya, tidak ada yang lain yang pantas untuk disalahkan. Karenanya, setidaknya menurut saya, pada dasarnya pemerintah Indonesia “tidak memerlukan” simpati tapi mungkin partisipasi dan dukungan masyarakat. Simpati mempunyai konotasi negatif, misalnya lemah. Pemerintah seharusnya bukan lembaga lemah yang minta dikasihani. Tapi lembaga yang bisa dipercaya dapat menjalankan tugasnya seperti tercantum pada UUD 1945 yang perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini harus diyakini dan disadari oleh masyarakat. Menurut saya, pemerintah Indonesia di bawah Orde Baru adalah pemerintah yang kuat. Sehubungan dengan Pemilu tahun 1997 mendatang dukungan inilah yang perlu diberikan kepada pemerintah. Caranya adalah dengan mensukseskan Pemilu 1997 dan Sidang umum MPR tahun 1998. Kriteria sukses pemilu ini kita semua sudah mengetahuinya. **Jangan lupa akan hal itu.**

2. Walaupun ada kekurangan-kekurangan di pihak pemerintah, itu suatu hal yang lumrah. Tidak ada suatu pemerintahanpun di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan warganya yang sangat beragam. Di mana-mana selalu ada kritik masyarakat terhadap pemerintahnya. Saya pikir itu adalah dinamikanya hidup bernegara. Apalagi di negara besar seperti Indonesia. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Asril Saman tentang berbagai peristiwa dan tuntutan masyarakat untuk berbagai perbaikan, harus dipandang sebagai peristiwa yang wajar, apalagi kalau dilakukan dengan prosedur yang benar. Tentu saja kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan negara dan bangsa tetap selalu dilakukan. Hal tersebut di samping disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh pemakalah tadi, mungkin juga disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, atau mungkin oleh benar-benar kealpaan pemerintah. Kalau yang terakhir ini benar seharusnya peringatan masyarakat harus diucapkan terima kasih.
3. Globalisasi haruslah dipandang dari sudut yang lebih positif. Memang di satu sisi ada tantangan atau ancaman. Tapi di sisi lain, malah mungkin lebih besar, adalah kesempatan yang lebih baik. Yang perlu diingat bahwa dia bukan akan

datang, tetapi sudah datang dan kita sudah berada di dalamnya. Sebetulnya proses kearah globalisasi itu telah dimulai sejak 1970-an di mana batas-batas lokal, karena kemajuan ilmu dan teknologi, secara perlahan tetapi pasti mulai terbuka menjadi global. Menurut saya globalisasi itu bukan diciptakan dan dimiliki bangsa-bangsa tertentu, tetapi diciptakan dan dimiliki oleh peradaban manusia di zamannya. Jadi milik kita juga, dan kita apakah itu langsung atau tidak langsung ikut menciptakannya dan sekaligus menikmatinya. Sebagai contoh, sumbangan ekspor barang dan jasa secara rata-rata terhadap GNP dunia adalah 14% pada tahun 1970, menjadi 21% pada 1991. Untuk Indonesia dari 13 menjadi 28%, Cina menjadi dari 24%, dan Malaysia dari 42% menjadi 80%.

4. Sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga, dianggap remeh dan tak berharga dalam hidup. Karenanya pendekatan budaya dalam pemerintahan memang bisa menjanjikan keberhasilan. Tapi belum tentu hal itu baik dan bermanfaat. Kuntjaraningrat memperingatkan beberapa orientasi nilai budaya bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian dalam usaha-usaha pembangunan yang dianalisis berdasarkan kerangka Kluckon yang diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Ciri-ciri Mental Manusia Indonesia Sejak Zaman Kolonial

Masalah Hidup	Orientasi Nilai Budaya
Hakekat hidup	Hidup itu buruk, karena itu harus diingkari. Kalau kesukaran hidup memuncak mereka lari ke alam kebatinan.
Hakekat kerja	Kerja untuk mencapai kedudukan dan lambang-lambangnyanya. Kerja bertujuan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Kedudukan berarti juga bekerja di belakang meja.
Hakekat kedudukan manusia dalam ruang waktu	Menaruh perhatian sangat besar pada waktu yang lalu, kurang memperhatikan masa yang akan datang.

Hakekat hubungan manusia dengan alam	Manusia sebaiknya menselaraskan diri dengan alam. Ada tiga konsep yang berhubungan dengan hal ini: nrima, sabar dan ikhlas.
Hakekat hubungan manusia sesama-nya	Memandang ke tokoh di atas (pemimpin). Diperkirakan nilai ini sebagai sumber korupsi. Kalau ada pimpinan yang datang biasanya acara akan berupa: petunjuk, wejangan, amanat, pengarahan, restu dari pimpinan.

Semuanya ini harus dipertimbangkan dalam menggunakan pendekatan budaya dalam pemerintahan. Artinya kita harus selektif dalam menggunakan nilai-nilai budaya yang cocok untuk mensukseskan pemerintahan.

- Selain itu, dalam memandang globalisasi dan hubungannya dengan budaya sendiri, menurut hemat saya kita tidak perlu terlalu defensif. Sehingga budaya kita harus "diselamatkan" atau malah "dipertahankan". Identitas suatu bangsa memang harus dipertahankan sampai titik darah terakhir. Tapi banyak juga nilai-nilai budaya yang memang perlu dirombak. Di samping itu malah kita harus berusaha pula memfungsikan budaya kita dalam kehidupan global.

C. Pentutup

Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam forum yang sangat penting ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya minta maaf.

Padang, November 1996

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG